



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

Lehrter Str. 16-17, 10557 Berlin Germany
Tel. +49 30 478070, Fax. +49 30 44737142

SIARAN PERS

No. 44/PEN/PR/XI/12

**Dukungan Penuh KBRI Berlin terhadap Kunjungan Kerja
Baleg DPR-RI ke Jerman untuk Memperoleh Hasil Maksimal**

Pada tanggal 18 November 2012, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI yang dipimpin oleh Bapak Sunardi Ayub telah mengunjungi Berlin dan selama di Berlin berkesempatan melakukan kunjungan ke beberapa instansi/lembaga, yaitu *Deutsches Institut fur Normung (DIN) e.V*; Komite Pendidikan, Penelitian dan Teknologi, Parlemen Jerman; Komite Ekonomi, Parlemen Negara Bagian Brandenburg dan Kementerian Ekonomi dan Teknologi dan *Bundesingenieurkammer (Federal Chamber of Engineers)*.

Dalam kunjungan tersebut, para anggota Baleg DPR-RI melakukan pertemuan dengan instansi dan lembaga Pemerintah maupun independen, khususnya yang mempunyai keterkaitan dengan tujuan kunjungan Baleg DPR-RI yaitu memperkaya bahan rujukan dalam rangka pembuatan Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran. Jerman dipandang sebagai negara yang memiliki UU Keinsinyuran yang maju dan sukses. Hal lain yang juga menjadi perhatian anggota Baleg DPR-RI adalah karena setiap negara bagian di Jerman memiliki UU Keinsinyuran yang berbeda satu dengan negara bagian yang lainnya dan dapat memberikan referensi yang cukup untuk penyusunan RUU Keinsinyuran di Indonesia. RUU ini sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2012, yang mana draft RUU ini disiapkan oleh Baleg DPR-RI.

PUSAT KOMUNIKASI - KEMLU

Pada pertemuan dengan *Deutsches Institut fur Normung (DIN)*, misalnya, Baleg DPR-RI mendapatkan masukan mengenai lembaga tersebut dan tugas utamanya. DIN dijadikan referensi oleh Pemerintah Jerman sebagai badan yang bisa memberikan standarisasi terhadap produk-produk dan jasa di Jerman, Uni Eropa (UE) dan bahkan dunia Internasional, dan dapat juga memberikan masukan dalam pembentukan Undang-undang atau peraturan terkait.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan pejabat Komite Pendidikan, Penelitian dan Teknologi, Parlemen Jerman, DR. Thomas Feist, baleg DPR-RI mendapatkan masukan terutama mengenai standarisasi dan harmonisasi pendidikan khususnya di bidang teknik atau “Dipl. Ing” di UE. Delegasi Baleg DPR-RI juga mendapat masukan mengenai sistem pengaturan pendidikan dan gelar keinsinyuran di universitas teknik di Jerman. Pengaturan pendidikan di Jerman tidak ditangani di tingkat Federal, setiap negara bagian mempunyai pengaturan dan UU sendiri. Pemerintah Federal hanya mengatur tentang *Vocational Education and Training* dan penelitian yang dilakukan oleh lembaga non universitas”, demikian dijelaskan oleh Feist.

Jerman memiliki dua sistem pendidikan yang berbeda dalam hal pengaturan pendidikan teknik keinsinyuran. Pertama, siswa SMA yang menyelesaikan sekolahnya dapat memasuki pendidikan kejuruan dimana mereka dilatih sebagai mekanik mobil (mechatroniker), pekerja konstruksi, tukang las dan lainnya. Untuk standar pendidikan tersebut diatur oleh Kamar Dagang dan Industri dimana semua perusahaan harus menjadi anggota. Kedua adalah sistem pendidikan untuk siswa SMA yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi/universitas dan bergelar. Siswa alumni universitas tersebut adalah yang berhak mendapat gelar keinsinyuran.

Di Jerman sendiri, terdapat Undang-undang yang sifatnya khusus, seperti halnya undang-undang Insinyur (*Ingenieurgesetz*) yang diatur oleh pemerintah daerah (*Landesregierung*). Badan legislatif daerah dari masing-masing negara bagian mengatur antara lain pengaturan mengenai insinyur, sistem pendidikan dan lain-lain.

Pertemuan Baleg DPR-RI dengan Mr. Kosanke Ketua Komite Ekonomi, Parlemen Negara Bagian Brandenburg dan Dr. Martin Wulff Menteri Ekonomi dan Urusan Eropa serta Mr. Ralf Christoffers Ketua Chamber of

Engineers antara lain dijelaskan betapa pentingnya peranan lembaga seperti *Chambers of Engineers* untuk membantu pemerintah pusat maupun negara bagian di Jerman dalam melakukan pengawasan terhadap kategori profesional tertentu seperti pengacara, dokter dan tentu insinyur. "*Chamber of Engineers* dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan kontrol dan tunduk terhadap negara bagian. Beda dengan sejumlah organisasi atau asosiasi yang bekerja di bawah hukum privat," demikian kata Ketua *Chamber of Engineers* Mr. Ralf Christoffers. Anggota *Chamber of Engineers* terdiri dari berbagai kalangan dan memiliki tingkat independensi yang tinggi. Salah satu fungsi utama dari *Chamber of Engineers* ini adalah melanjutkan pendidikan bagi para anggotanya. Sebagai contoh adalah di sektor energi. Beberapa insinyur yang tidak belajar banyak tentang energi selama studi akademis mereka. Tugas *Chamber* adalah membekali mereka dengan pengetahuan yang lebih luas dalam rangka memperkuat daya saing mereka. *Chamber of Engineers* juga bertindak sebagai penasihat pemerintah negara bagian.

Menanggapi pertanyaan delegasi Baleg DPR-RI terkait jaminan kualitas teknik dan pemberian sanksi atau konsekuensi hukum, Ketua *Chamber of Engineers* Mr. Ralf Chistoffers menegaskan bahwa memang ada sanksi. Misalnya anggota yang kualitas produksinya tidak baik akan berhadapan dengan pengadilan. Sanksi yang paling berat adalah pencabutan lisensi sehingga si insinyur tersebut tidak bisa bekerja di bidang ini lagi. Ada begitu banyak otoritas inspeksi dan lembaga perizinan di Jerman yang mengontrol kualitas teknik. "Tidak semua insinyur menjadi anggota *Chamber of Engineer*. Ada insinyur independen, terutama yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri," demikian kata Christoffers.

Sedangkan mengenai kualitas pendidikan adalah tanggungjawab perguruan tinggi. Seorang insinyur berhak untuk membuat rencana pembangunan jika yang bersangkutan memiliki gelar akademis di bidang teknik konstruksi serta dua tahun pengalaman.

Dubes RI, Dr. Eddy Pratomo menyatakan bahwa pihak KBRI mendukung seluruh kunjungan yang memang mempunyai tujuan dan visi yang jelas. Dubes RI menambahkan bahwa pihak KBRI selalu berkonsultasi dengan Kementerian terkait dalam mendiskusikan substansi diskusi maupun lembaga yang akan dikunjungi. Dr. Eddy Pratomo juga menyambut baik ajakan dialog dari seluruh komponen warga Indonesia di Jerman dengan

seluruh pejabat lembaga Negara Indonesia yang berkunjung ke Jerman. Pertemuan semacam itu justru diharapkan akan menjadi forum komunikasi seluruh komponen bangsa.

Dalam kunjungan kerja Baleg ini, KBRI telah menyelenggarakan pertemuan formal dengan delegasi bertempat di KBRI Berlin. Dalam pertemuan tersebut KBRI menyampaikan gambaran mengenai pokok-pokok dari Undang-Undang Keinsinyuran yang dimiliki oleh beberapa negara bagian di Jerman yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan RUU Keinsinyuran Indonesia. Pertemuan dipimpin oleh Dubes RI, Dr. Eddy Pratomo dan Bpk. Sunardi Ayub selaku pimpinan Delegasi Baleg.

LBRI selalu memberikan dukungan penuh dan fasilitasi yang diperlukan oleh DPR dalam setiap kunjungannya. KBRI juga selalu berupaya menjembatani dialog antar unsur-unsur masyarakat di Jerman dengan setiap Delegasi Kunker DPR-RI, meskipun tidak selalu berhasil.

Mengingat pentingnya setiap Kunker DPR ke Jerman yang memerlukan tindak-lanjut untuk kepentingan dinas yaitu pelaporan ke Pemerintah Pusat dan tidak pernah menyampaikan kepada publik. Dengan demikian sekiranya terdapat beberapa dokumentasi yang diunggah ke media sosial, maka dapat dipastikan bukan berasal dari KBRI.

Berlin 26 November 2012